

TAJUK KHUSUS

EMPAT POIN UTAMA DESAIN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024



Pada tanggal 19 Mei 2023, Pemerintah menyampaikan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024 kepada DPR RI yang menandai *kick off* pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024. Dokumen KEM dan PPKF tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dimana di dalamnya memuat beberapa hal utama yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Fokus Kebijakan terbagi pada jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Untuk jangka pendek, Pemerintah akan fokus pada Pengendalian inflasi (stabilitas harga), Penghapusan kemiskinan ekstrem, Penurunan prevalensi *stunting*, dan Peningkatan investasi. Inflasi pada tahun 2024 ditargetkan berada dalam rentang 2,5% ±1%. Sementara itu, target penurunan tengkes (*stunting*) diproyeksikan sebesar 3,8% per tahun atau secara akumulatif berada pada level 14,0-17,6%.

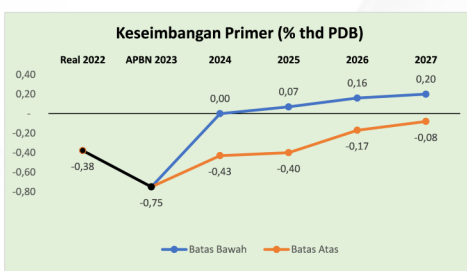
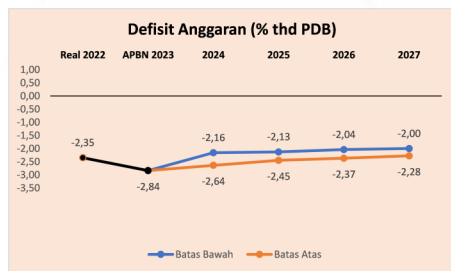
Tahun 2024 juga ditargetkan sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem yaitu sebuah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem apabila biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu jika pengeluarannya di bawah Rp.10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan. Terkait penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, diperlukan *extra effort* melalui program yang menasar seluruh individu di Desil 1 sebesar 27,4 juta jiwa.

Pemerintah juga tetap fokus dalam peningkatan investasi yang dilakukan melalui (1) perbaikan regulasi melalui penyusunan peraturan turunan dan implementasi UU Cipta Kerja, UU HPP, UU HKPD, dan UU P2SK, (2) pemberian insentif fiskal (*tax holiday*, *super deduction R&D*, *investment allowance*, dan *tax allowance*), serta (3) optimalisasi peran Indonesia Investment Authority (INA).

Di lain sisi, transformasi ekonomi tetap dijalankan secara sungguh-sungguh guna menasar target jangka menengah-panjang terutama terselesainya agenda reformasi struktural diantaranya *human capital gap*, *infrastructure gap*, dan *institutional gap*. Semua fokus tersebut diharapkan akan bermuara pada terwujudnya visi Indonesia Maju 2045.

Kedua, Kesenambungan Fiskal yaitu reformasi APBN yang efektif dan konsisten dilakukan guna mengarahkan pengelolaan fiskal ke jalur yang lebih sehat, berkelanjutan, dan menjaga stabilitas perekonomian di masa depan. Upaya konsolidasi fiskal juga penting agar tidak terjadi *crowding out effect* yang berdampak pada pelemahan peran investasi swasta yang pada akhirnya memiliki dampak tularan yang mengganggu potensi pertumbuhan dan kesehatan ekonomi jangka panjang.

TARGET KESINAMBUNGAN FISKAL JANGKA MENENGAH TAHUN 2022 s.d 2027



Sumber: Kem dan PPKF 2024, Kemenkeu

Upaya konsolidasi fiskal dilakukan melalui reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan. Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisit dimana secara umum akan ditempuh melalui pembiayaan utang maupun nonutang. Pembiayaan utang 2024 juga akan dimanfaatkan untuk penguatan *countercyclical* sekaligus untuk pendalaman pasar. Sementara pembiayaan nonutang utamanya pembiayaan investasi tahun 2024 ditujukan untuk mendorong pembiayaan inovatif antara lain penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif dengan menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi di kisaran 0,30 - 0,67 persen dari PDB pada tahun 2024.

Ketiga, Pagu Indikatif Belanja K/L dan Transfer ke Daerah Tahun 2024. Dalam penyusunan Pagu Indikatif belanja K/L tahun anggaran 2024, fokus utama adalah pada penajaman tema prioritas Presiden dalam jangka pendek serta menjaga transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang melalui reformasi struktural. Selain itu, kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi yaitu prioritas nasional, penyelenggaraan Pemilu 2024, pembangunan IKN, bantuan iuran program JKN untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPBU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III; penyaluran bansos reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, dan bantuan premi PBI JKN, pemenuhan kebutuhan Alpalhankam secara bertahap, dan pendanaan proyek-proyek *multi years contract* dan KPBU-AP.

Pemerintah akan memperkuat sinkronisasi Belanja K/L, TKD (DAK), dan Belanja non-K/L terutama dalam mendukung prioritas nasional seperti pemberian subsidi pupuk maupun bantuan sosial. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan terutama di pemerintah pusat perlu memastikan RO K/L untuk kegiatan belanja yang ditujukan untuk masyarakat/pemda sinkron dengan output yang didanai melalui TKD (DAK) dan Belanja non-K/L lainnya.

Sementara itu, dari sisi transfer ke daerah, alokasi TKD juga sangat erat dengan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Sebagaimana UU HKPD, pengalokasian TKD akan dipengaruhi oleh *outlook* pendapatan negara sebelumnya, kebutuhan anggaran daerah, alokasi TKD sebelumnya, serta kapasitas fiskal APBN. Secara singkat kebijakan TKD akan diarahkan pada peningkatan sinergi pusat-daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD, penggunaan *earmarking* pada sektor prioritas (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial), dan optimalisasi untuk program prioritas nasional seperti stabilitas inflasi, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penanganan *stunting*, serta pelestarian lingkungan hidup.

Keempat, menambahkan penyampaian KEM PPKF Regional sebagai bentuk sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai bentuk evaluasi terhadap sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan nasional, KEM PPKF tahun 2024 muncul dengan wajah baru dengan mengakomodir substansi kewilayahan pada Bab VII. Beberapa target output K/L tahun berjalan (2023) dijelaskan secara kewilayahan/per pulau besar. Lebih lanjut pada lampiran, menu kewilayahan pada target indikator ekonomi makro disajikan lebih menantang, dengan mencatatkan *outlook target* pada tahun yang direncanakan atau 2024. Menariknya, *data series* memuat evaluasi dengan varian warna yang menunjukkan ketercapaian target agenda pembangunan nasional di wilayah tersebut. Hal ini memberikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah agar bersinergi dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dengan menggunakan dimensi spasial.

Saat buletin ini ditulis, Pemerintah sedang melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan KEM dan PPKF 2024. Secara lebih lengkap dokumen KEM dan PPKF 2024 dapat diunduh pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/kem-ppkf>

Realisasi APBN

s/d 31 Mei 2023

Uraian (triliun rupiah)	2022		2023				
	Growth Real s.d. 31 Mei (%)	APBN	Real s.d. 31 Mei	% thd APBN	Growth y-o-y (%)	Growth m-o-m (%)	Growth m-t-m (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	▲ 47,3	2.463,0	1.209,3	49,1	▲ 13,0	▼ (3,8)	▼ (40,9)
I. Penerimaan Perpajakan	▲ 51,3	2.021,2	948,7	46,9	▲ 12,2	▼ (2,4)	▼ (40,3)
1. Penerimaan Pajak	▲ 53,5	1.718,0	830,3	48,3	▲ 17,7	▲ 2,9	▼ (44,5)
2. Kepabeanan & Cukai	▲ 41,3	303,2	118,4	39,0	▼ (15,6)	▼ (25,3)	▲ 7,1
II. PNBP	▲ 33,7	441,4	260,5	59,0	▲ 16,2	▼ (8,7)	▼ (43,1)
III. Hibah	▲ 648,3	0,4	0,1	31,7	▼ (34,1)	▼ (25,7)	▼ (33,7)
B. BELANJA NEGARA	▼ (0,8)	3.061,2	1.005,0	32,8	▲ 7,1	▲ 27,4	▼ (3,2)
I. Belanja Pemerintah Pusat	▲ 1,0	2.246,5	714,6	31,8	▲ 9,3	▲ 31,6	▲ 9,4
1. Belanja K/L	▼ (11,3)	1.000,8	326,2	32,6	▲ 2,2	▲ 4,5	▼ (24,5)
2. Belanja non-K/L	▲ 16,3	1.245,6	388,4	31,2	▲ 16,0	▲ 53,7	▲ 45,8
II. Transfer Ke Daerah	▼ (4,6)	814,7	290,3	35,6	▲ 2,1	▲ 13,0	▼ (34,1)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	▲ 542,8	(156,8)	390,5	(249,1)	▲ 30,7	▼ (79,3)	▼ (88,9)
D. SURPLUS/(DEFISIT)	▲ 160,2	(598,2)	204,3	(34,2)	▲ 54,8	▼ (204,0)	▼ (128,6)
% thd PDB		(2,84)	0,97				
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	▼ (73,1)	598,2	118,4	19,8	▲ 41,6	▼ (77,0)	▼ (623,4)
SiLPA/(SiKPA)			322,7				

LEADING INDICATORS YANG BERPENGARUH TERHADAP POSTUR APBN

Kinerja sektor riil mengalami moderasi pasca periode HBKN (Ramadan-Lebaran) pada bulan Mei 2023. Indeks penjualan riil mengalami penurunan secara bulanan, yang juga diikuti penurunan kinerja dari sisi produksi dengan PMI manufaktur Indonesia yang turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, secara keseluruhan kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun, serta PMI yang masih berada dalam zona ekspansif dalam 21 bulan terakhir. Stabilitas perekonomian Indonesia juga tergambar dari sisi pasar keuangan domestik yang kembali melanjutkan kinerja positifnya pada Mei 2023. Meskipun dari sisi eksternal *The Fed* kembali menaikkan suku bunga acuannya di bulan Mei 2023, nilai tukar rupiah masih stabil dan cenderung menguat, serta suku bunga SUN cenderung terus menurun. Selain itu, harga komoditas dunia kembali melanjutkan tren penurunan di bulan Mei 2023. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dipengaruhi oleh penurunan permintaan global, serta peningkatan ekspor Rusia yang menciptakan rekor tertinggi pasca dimulainya konflik dengan Ukraina. HBA Mei 2023 mengalami penurunan yang cukup tinggi hingga mencapai US\$206,16/ton yang digunakan untuk penentuan tarif royalti dan pada perhitungan Harga Patokan Batubara (HPB) kalori >6000. Sementara itu, harga referensi CPO Indonesia pada Mei 2023 juga mengalami penurunan, dipengaruhi terutama oleh penurunan dari sisi permintaan seiring dengan penurunan Impor CPO oleh India, meskipun terjadi penurunan volume ekspor CPO Malaysia yang menyebabkan terjadinya penurunan *supply*. Penurunan harga CPO dunia juga selaras dengan turunnya harga minyak nabati lainnya, seperti minyak bunga matahari yang merupakan bahan dasar dari biofuel.

SEKTOR RIIL	Mei-23	mtm(%)	yoy(%)	Pengaruh
1. Inflasi (% ytd)	1,10	▲ 0,09	▲ 4,00	• PPh • PPN • PNEP K/L
2. Indeks Penjualan Riil	234,2	▼ 8,7	▲ 0,1	• PPh • PPN • Cukai
3. Indeks Keyakinan Konsumen	128,3	▲ 2,2 poin	▼ 0,6 poin	• PPh • PPN • Cukai
4. PMI Manufaktur Indonesia	50,3	▼ 2,4 poin	▼ 0,5 poin	• PPN • PPh • PNEP SDA

SEKTOR MONETER	Mei-23	Mtm(%)	Yoy(%)	Pengaruh
1. Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.811	▲ 0,4	▼ 1,4	• Perpajakan • PNEP SDA • Subsidi dan Kompensasi
2. Yield SUN-10 Thn (%)	6,38	▼ 0,26 poin	▼ 0,89 poin	• Belanja Bunga Utang • Pembiayaan Anggaran (Utang)

SEKTOR EKSTERNAL	Mei-23	Mtm(%)	Yoy(%)	Pengaruh
1. ICP (US\$/brl)	70,12	▼ 11,6	▼ 36,0	• PPh Migas • PNEP SDA • Subsidi dan Kompensasi • Transfer ke Daerah
2. HBA (US\$/T)	206,16	▼ 22,3	▼ 25,2	• PNEP SDA • Transfer ke Daerah
3. Harga CPO (US\$/MT)	893,2	▼ 4,2	▼ 46,1	• Bea Keluar • PNEP BLU

PENDAPATAN NEGARA

"Meskipun masih tumbuh positif, kinerja pendapatan negara sampai dengan Mei 2023 mulai termoderasi dan menunjukkan kecenderungan normalisasi"

Sampai dengan s.d 31 Mei 2023, pendapatan negara masih berada di level *double digit* dengan pertumbuhan sebesar 13,0% (yoy) atau mencapai Rp1.209,3 triliun (49,1% terhadap APBN 2023). Peningkatan tersebut utamanya dikontribusikan dari sumber penerimaan utama yang berasal dari perpajakan dan PNBP. Kinerja penerimaan perpajakan tumbuh 12,2% dipengaruhi terutama oleh perbaikan ekonomi domestik, implementasi dampak kebijakan (UU HPP), serta masih tingginya harga komoditas. Sementara itu, PNBP juga mampu meningkat sebesar 16,2% (yoy) dipengaruhi di hampir semua penerimaan PNBP kecuali SDA Migas. Di sisi lain, untuk realisasi hibah mencapai Rp0,13 triliun yang dikontribusikan oleh hibah luar negeri terencana.

PERPAJAKAN SAMPAI DENGAN MEI 2023: KINERJA PAJAK TERMODERASI, CUKAI TERKONTRAKSI

Sampai dengan Mei 2023, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp948,7 triliun atau tumbuh 12,2% (YoY). Capaian tersebut terus menunjukkan gejala normalisasi meskipun masih tumbuh *double digit* ditopang kinerja positif penerimaan pajak. Selama periode Januari sampai dengan Mei 2022, penerimaan pajak mencapai Rp830,3 triliun atau tumbuh 17,7% (YoY). Capaian penerimaan pajak tersebut masih tumbuh positif meskipun terdapat jenis pajak utama yang mengalami kontraksi yaitu PPh Final. PPh Final mengalami kontraksi karena kebijakan PPS yang tidak berulang di tahun 2023. Selanjutnya, jika dilihat secara sektoral, seluruh sektor

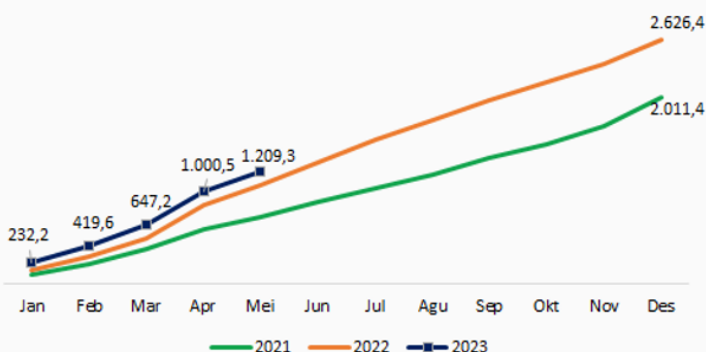
utama masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Pertumbuhan tertinggi masih dialami sektor pertambangan didorong setoran PPh Badan Tahunan khususnya dari sektor pertambangan batubara. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masih tumbuh positif didukung pertumbuhan pembayaran sektor industri makanan untuk sektor industri pengolahan serta pergeseran pembayaran PPh Pasal 29 Tahunan Tahun Pajak 2022 di bulan Mei 2023.

Selanjutnya Penerimaan kepabeanaan dan cukai pada s.d 31 Mei 2023 mencapai Rp118,4 triliun atau terkontraksi 15,6% (YoY) yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan cukai dan bea keluar. Penerimaan cukai mengalami penurunan sebesar 12,1% terutama disebabkan oleh penurunan produksi pada bulan Maret 2023 dipengaruhi adanya lonjakan di basis produksi Maret 2022 akibat kenaikan PPN. Sementara itu, penerimaan bea keluar mengalami penurunan tajam mencapai 67,5% (YoY) yang dipengaruhi oleh harga CPO yang lebih rendah dan turunnya volume ekspor komoditas mineral. Berdasarkan jenis komoditas ekspor yang dikenakan bea keluar, hanya jenis kayu dan kulit serta kakao yang mengalami peningkatan. Di sisi lain, satu-satunya komponen kepabeanaan dan cukai yang mengalami pertumbuhan adalah bea masuk dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,9% (YoY) yang dipengaruhi oleh faktor kurs rupiah terhadap dolar serta kinerja impor utamanya pada sektor gas, kendaraan roda empat, suku cadang, serta mesin tambang dan konstruksi.

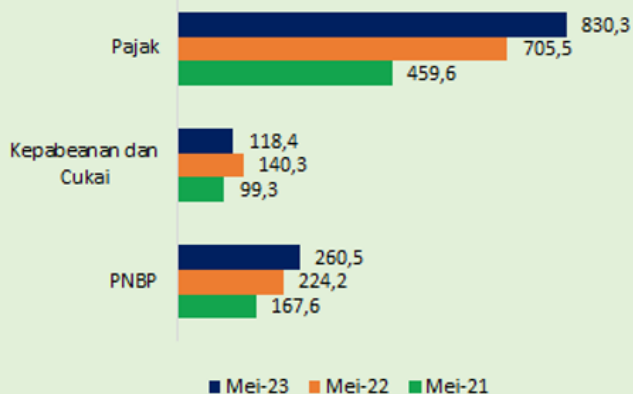
Selanjutnya penerimaan perpajakan diperkirakan tetap tumbuh dengan didorong aktivitas ekonomi domestik meskipun akan cenderung mengalami normalisasi yang dipengaruhi oleh realisasi restitusi dan penurunan harga komoditas di masa mendatang. Sementara itu, penerimaan kepabeanaan dan cukai terutama di sisi cukai memerlukan upaya ekstra guna mencapai target APBN 2023. Di sisi lain, penerimaan bea keluar pada bulan berikutnya akan dipengaruhi oleh tren harga CPO serta progres penyelesaian smelter tembaga. Sedangkan penerimaan bea masuk diharapkan dapat mengalami peningkatan dengan permintaan barang luar negeri yang semakin meningkat.

Secara rinci penerimaan perpajakan dan *forward looking* dapat dilihat pada [link https://bit.ly/DashboardPerpajakanLenteraBulanJuni2023](https://bit.ly/DashboardPerpajakanLenteraBulanJuni2023)

Pendapatan Negara, 2021-2023 (Rp triliun)



Komponen Pendapatan Negara s.d Mei, 2021-2023 (Rp triliun)



REALISASI PNBP MEI 2023 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN SDA DAN PENDAPATAN KND

Kinerja PNBP bulan Mei 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Realisasi PNBP sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai Rp260,5 triliun atau 59,0 persen dari APBN Tahun 2023, tumbuh 16,2 persen (yoy). Kenaikan ini terutama didorong oleh tingginya pendapatan SDA dampak dari tingginya harga komoditas di pasar internasional terutama minerba dan pendapatan KND terutama dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Realisasi pendapatan SDA migas sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai Rp51,1 triliun atau 39,0 persen dari APBN Tahun 2023, mengalami kontraksi 18,8 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya ICP dan *lifting* migas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata ICP

periode Desember 2022 - April 2023 mencapai US\$77,7/barel (2022: US\$94,2/barel). Sementara itu, pada periode Desember 2022 - April 2023 rata-rata *lifting* minyak bumi mencapai 617,7 ribu barel/hari (2022: 623,7 ribu barel/hari) dan rata-rata *lifting* gas bumi mencapai sebesar 952,0 ribu barel/hari (2022: 958,4 ribu barel/hari).

Pendapatan SDA Nonmigas menunjukkan kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp68,7 triliun sampai dengan 31 Mei 2023 atau 106,0 persen dari APBN Tahun 2023, tumbuh signifikan sebesar 116,9 persen (yoy). Kenaikan ini didukung oleh pendapatan SDA pertambangan minerba yang tumbuh 129,2 persen (yoy) yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas minerba, terutama batubara. Rata-rata HBA Januari - Mei 2023 mencapai US\$267,4/ton (2022: US\$222,9/ton). Realisasi pendapatan SDA kehutanan juga tumbuh 2,7 persen (yoy) disebabkan oleh kenaikan produksi kayu bulat. Sementara itu, realisasi pendapatan SDA perikanan terkontraksi 94,9 persen (yoy) disebabkan oleh perubahan metode perhitungan PNBP PHP Pra-produksi menjadi Pasca-produksi dimana rata-rata kapal penangkap ikan beroperasi 2-4 bulan di laut, sehingga pada bulan Mei tahun 2023 masih sedikit kapal yang mendaratkan ikan. Selain itu, terdapat penurunan Harga Acuan Ikan (HAI) yang digunakan dalam perhitungan PNBP PHP Pascaproduksi dibandingkan dengan Harga Patokan Ikan (HPI) yang digunakan dalam perhitungan PNBP PHP Praproduksi. Selanjutnya, realisasi pendapatan SDA panas bumi juga terkontraksi 3,9 persen (yoy) disebabkan oleh tidak adanya penerimaan berdasarkan kurang bayar hasil audit, walaupun iuran tetap dan iuran produksi/royalti panas bumi mengalami peningkatan.

Realisasi pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai sebesar Rp41,7 triliun atau 84,9 persen dari APBN Tahun 2023, tumbuh 66,1 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan yang tumbuh 66,2 persen (yoy).

Realisasi PNBP Lainnya sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai Rp69,6 triliun atau 61,4 persen dari APBN Tahun 2023, terkontraksi 1,1 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan PNBP K/L yang mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen (yoy) terutama berasal dari penurunan pendapatan TAYL dan denda. Di sisi lain, pendapatan pada beberapa layanan K/L antara lain pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan jasa transportasi, serta pendapatan fungsi jasa agraria mengalami peningkatan. Selanjutnya, pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) terkontraksi 1,5 persen (yoy). Sedangkan pendapatan minyak mentah (DMO) sampai dengan 31 Mei 2023 belum mencatatkan penerimaan.

Realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 31 Mei 2023 terkontraksi 13,5 persen (yoy), yaitu mencapai Rp29,5 triliun atau 35,5 persen dari APBN Tahun 2023. Penurunan ini terutama berasal dari pendapatan pengelolaan dana perkebunan sawit, jasa layanan pendidikan, dan pendapatan jasa layanan Rumah Sakit.

Berdasarkan kinerja PNBP sampai dengan bulan Mei tahun 2023, diperkirakan sampai akhir tahun 2023 terdapat potensi tambahan realisasi PNBP dibandingkan target yang telah ditetapkan pada APBN, terutama berasal dari tambahan setoran pendapatan KND. Beberapa kebijakan yang akan diambil dalam rangka mengoptimalkan

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara s.d. Mei tahun 2023 mencapai Rp1.005,0 triliun atau 32,8% terhadap pagu APBN tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, lebih tinggi sebesar 7,1% dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun lalu. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 71,1% dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 28,9%.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Mei tahun 2023 mencapai Rp714,6 triliun atau 31,8% terhadap pagu APBN tahun 2023, tumbuh 9,3% dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp653,9 triliun.

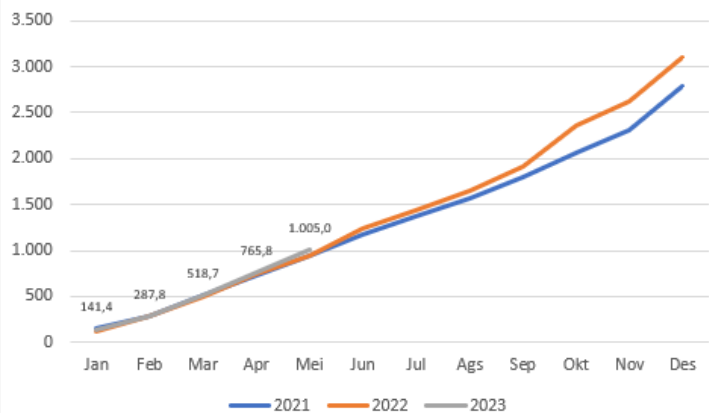
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat utamanya disumbangkan oleh realisasi belanja non-K/L sebesar Rp388,4 triliun (31,2% pagu APBN tahun 2023), meningkat 16,0% dibandingkan dengan realisasinya pada tahun lalu sebesar Rp334,7 triliun. Belanja non-K/L tersebut dimanfaatkan a.l. untuk penyaluran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi. Selanjutnya, realisasi belanja K/L sebesar Rp326,2 triliun (32,6% pagu APBN tahun 2023), meningkat 2,2% dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu sebesar Rp319,2 triliun. Belanja K/L tersebut dimanfaatkan a.l. untuk: (1) penyaluran berbagai program perlindungan sosial a.l. BOS, PIP, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, dan bantuan bencana; (2) penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis a.l. pembangunan bendungan, jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan.

Kinerja realisasi belanja K/L s.d. Mei tahun 2023 terutama disumbangkan oleh tingginya realisasi belanja modal dan belanja barang yang berturut-turut tumbuh sebesar 18,2% dan 3,6% terhadap realisasinya tahun lalu. Namun demikian, untuk realisasi belanja pegawai dan bantuan sosial s.d. Mei tahun 2023 berturut-turut turun sebesar 0,1% dan 6,4% terhadap realisasinya tahun lalu. Adapun penjelasan kinerja belanja K/L menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

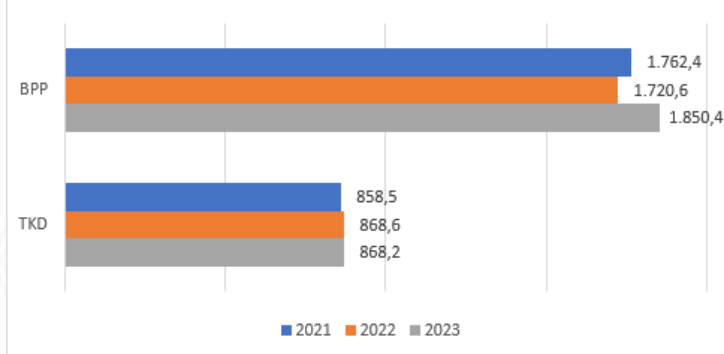
Realisasi belanja pegawai sebesar Rp101,0 triliun (37,0% terhadap pagu APBN tahun 2023), relatif sama dengan realisasinya tahun lalu, terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp68,7 triliun dan komponen Tunjangan kinerja, Honorarium, Lembur, dll. sebesar Rp32,3 triliun. Realisasi belanja

pegawai tersebut termasuk untuk penyaluran THR dan gaji-13 pada bulan April s.d. Juni tahun 2023. Kemudian, realisasi belanja barang sebesar Rp113,5 triliun (30,2% terhadap pagu APBN tahun 2023), tumbuh 3,6% terhadap realisasinya tahun lalu disumbangkan oleh a.l. belanja operasional K/L serta berbagai kegiatan pelayanan publik. Realisasi belanja barang pada beberapa K/L strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kemenag sebesar Rp8,9 triliun a.l. untuk penyaluran BOS sebesar Rp5,3 triliun bagi 4,5 juta siswa, (2) Kemenhan sebesar Rp17,4 triliun a.l. untuk Harwat/peningkatan BMN, umum matra Matra Darat/Laut/udara/Integratif dan Alutsista, serta Pelayanan Kesehatan, (3) Kemen PUPR sebesar Rp11,9 triliun a.l. untuk Harwat Sarpras SDA, Penyediaan Akses Rumah Layak Huni, Penanggulangan Darurat Akibat Bencana, dan Preservasi Jalan Nasional, serta (4) Polri sebesar Rp10,9 triliun a.l. untuk Pengadaan/Dukungan Logistik, dan Pelayanan Kesehatan. Selain itu, belanja barang juga dimanfaatkan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 melalui pembentukan badan ad-Hoc Rp5,3 triliun. Selanjutnya, realisasi belanja modal sebesar Rp49,3 triliun (23,6% terhadap pagu APBN tahun 2023), tumbuh 18,2% terhadap realisasinya pada tahun lalu, dimanfaatkan untuk a.l. (i) pengadaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp18,5 triliun dimanfaatkan a.l. untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, preservasi jalan dan jembatan, prasarana perkeretaapian, serta fasilitas bandara dan pelabuhan terutama pada Kemen PUPR dan Kemenhub, (ii) pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp24,7 triliun a.l. untuk pengadaan almatsus pada Polri, pengadaan alutsista pada Kemenhan, dan peralatan intelijen taktis pada Kejaksaan dan BIN, serta (iii) pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp4,2 triliun a.l. untuk pembangunan gedung perkantoran di kawasan IKN oleh Kemen PUPR, pembangunan terminal dan gedung akademik pada Kemenhub, pembangunan gedung dikti pada Kemendikbud, serta pembangunan rusun prajurit TNI dan Polri. Realisasi bantuan sosial sebesar Rp62,5 triliun (42,09% terhadap pagu APBN tahun 2023), lebih rendah 6,4% terhadap realisasinya pada tahun lalu, dimanfaatkan untuk a.l. (I) penyaluran bantuan sosial pada Kemensos sebesar Rp30,8 triliun a.l. untuk program keluarga harapan (PKH) untuk 9,9 juta KPM, penyaluran program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM; (II) pembayaran bantuan pada Kemenkes sebesar Rp19,3 triliun untuk penyaluran bantuan iuran

Belanja Negara, 2021 - 2023 (Rp Triliun)



Komponen Belanja Negara s.d. Mei TA 2021 - 2023 (Rp Triliun)



PBI JKN, dan Jampersal; (III) penyaluran bantuan PIP sebesar Rp5,3 triliun bagi 9,6 juta siswa dan KIP kuliah sebesar Rp5,8 triliun bagi 692,0 ribu mahasiswa pada Kemendikbudristek dan Kemenag; serta (IV) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB sebesar Rp1,4 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana Kab. Cianjur.

Realisasi belanja non-K/L s.d. Mei tahun 2023 terutama disumbangkan oleh pembayaran bunga utang, pembayaran pensiun, serta penyaluran subsidi. Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp68,0 triliun, meningkat sebesar 5,0% terhadap realisasinya tahun lalu sebesar Rp64,8 triliun disumbangkan oleh meningkatnya jumlah penerima pensiun PNS daerah menjadi kurang lebih 2,1 juta orang. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp186,1 triliun (42,2% terhadap pagu APBN tahun 2023) atau meningkat 11,7% terhadap realisasinya tahun lalu. Kemudian, realisasi belanja subsidi mencapai Rp75,1 triliun (25,1% terhadap pagu APBN tahun 2023), atau lebih rendah 0,5% dibandingkan realisasinya di periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan adanya pembayaran kurang bayar subsidi pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 ini tidak terdapat pembayaran kurang bayar. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) subsidi energi sebesar Rp54,2 triliun, mencakup subsidi BBM sebesar Rp6,7 triliun untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 5,6 juta KL, LPG tabung 3 Kg sebesar Rp26,9 triliun untuk penyaluran 2,6 juta MT, dan subsidi listrik sebesar Rp20,6 triliun bagi 39,2 juta pelanggan; dan (b) subsidi nonenergi sebesar Rp20,8 triliun, a.l. untuk penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 2,97 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 1,47 juta debitur dengan total penyaluran KUR sebesar Rp80,25 triliun dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 72,6 ribu unit rumah. Selain itu, realisasi belanja non-K/L juga

dimanfaatkan untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja sebesar Rp1,5 triliun untuk biaya pelatihan dan insentif bagi 454,1 ribu peserta pelatihan serta pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp52,0 triliun.

Memperhatikan kinerja Belanja Pemerintah Pusat s.d Mei, Pemerintah perlu menjaga dan mendorong kinerja belanja Pemerintah Pusat, terutama melalui belanja K/L agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. Pemerintah tetap menjaga komitmen untuk akselerasi pembangunan IKN. Sampai dengan April tahun 2023 telah direalisasikan dukungan anggaran sebesar Rp1,93 triliun untuk: (1) pembangunan *cluster* infrastruktur sebesar Rp1,5 triliun a.l. untuk Pembangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan-Kemenko-Kemensehreg, rumah tapak hunian Menteri, pembangunan sarpras Pemerintahan IKN, SPAM IKN, pembangunan embung KIPP, pengendali banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sepaku, bendungan Sepaku Semoi, pembangunan dan preservasi jalan & jembatan KIPP, rusun pekerja konstruksi, rehab dermaga, pengembangan bandara APT Pranoto Samarinda; serta (2) klaster noninfrastruktur sebesar Rp0,42 triliun untuk Peningjauan lokasi Kawasan IKN, survei pembangunan mabas TNI, dukungan pengamanan pembangunan IKN oleh POLRI, dukungan logistik, promosi investasi proyek prioritas, penataan dan pengelolaan BMN, serta Operasional Otorita IKN.

PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH S.D 31 MEI 2023

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai Rp290,3 triliun atau 35,6 persen dari pagu APBN tahun 2023, secara nominal dan persentase lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada tahun 2022 sebesar Rp284,2 triliun (35,3 persen). Hal ini terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi penyaluran DBH dan DAK Fisik serta DAK Nonfisik kepada daerah.

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Mei 2023 telah terealisasi sebesar Rp40,7 triliun atau 29,9 persen dari pagu. Realisasi DBH tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 85,0 persen (yoy) terutama disebabkan kenaikan alokasi DBH SDA pada pagu APBN tahun 2023 menjadi sebesar Rp95,8 triliun dibandingkan pagu tahun 2022 sebesar Rp61,6 triliun.

Selanjutnya, realisasi penyaluran DAU sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai Rp162,3 triliun atau 41,0 persen dari pagu, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp184,9 triliun (48,9 persen) terutama dipengaruhi oleh kecepatan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran DAU *earmarked* yang ditentukan penggunaannya secara lengkap. Adapun realisasi DAU terdiri atas: (a) DAU *nonearmarked* sebesar Rp142,4 triliun (49,7 persen), dan (b) DAU *earmarked* sebesar Rp19,9 triliun (18,2 persen). Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu, dan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut: (a) penyaluran bagian DAU untuk penggajian formasi PPPK untuk bulan April paling cepat tanggal 23 Mei 2023, untuk bulan Mei s.d Oktober paling cepat pada tanggal 23 bulan berikutnya, dan untuk bulan November s.d Desember paling lambat 2 hari kerja sebelum tahun anggaran 2023 berakhir; (b) penyaluran bagian DAU untuk pendanaan kelurahan untuk tahap I (sebesar 50%) paling cepat bulan Februari, dan tahap II (sebesar 50%) paling cepat bulan April serta paling lambat bulan Oktober; (c) penyaluran bagian DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dilakukan secara bertahap, tahap I paling cepat Februari sebesar 30%, tahap II paling cepat bulan April sebesar 45%, dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 25%.

DAK terdiri atas DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp2,6 triliun atau 4,8 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp1,9 triliun (3,0 persen) antara lain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan syarat salur DAK.

Sementara itu, DAK Nonfisik telah tersalurkan sebesar Rp50,5 triliun atau 38,8 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp41,2 triliun (32,0 persen). Realisasi DAK Nonfisik utamanya dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan semakin baiknya tingkat kepatuhan satuan pendidikan dalam melaporkan penggunaan dana periode sebelumnya. Sama dengan periode tahun 2022, jenis anggaran DAK Nonfisik yang belum terdapat realisasi s.d 31 Mei 2023 yaitu Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Hibah kepada Daerah sampai dengan 31 Mei 2023 telah tersalurkan sebesar Rp560,1 miliar atau 27,0 persen dari pagu APBN tahun 2023 sebesar Rp2,1 triliun yang diarahkan mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.

Dana Otonomi Khusus sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 telah tersalurkan sebesar Rp4,2 triliun (24,3 persen dari pagu) yang terdiri atas: (a) Dana Otsus Aceh sebesar Rp1,2 triliun atau 30,0 persen dari pagu; dan (b) Dana Otsus dan DTI Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp3,0 triliun atau 22,7 persen dari pagu yang ditujukan bagi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya, Dana Keistimewaan D.I.Y telah terealisasi sebesar Rp1,1 triliun atau 76,7 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp198,0 miliar (15,0 persen) yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang meliputi: (i) tata cara pengisian jabatan,

kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (ii) kelembagaan; (iii) kebudayaan; (iv) pertanahan; dan (v) tata ruang.

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp27,3 triliun atau 39,0 persen dari pagu, secara nominal lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp27,0 triliun (39,6 persen). Selanjutnya, penyaluran program BLT Desa dengan pagu sebesar Rp17,0 triliun untuk 4,72 juta KPM sampai dengan 31 Mei 2023 telah tersalurkan sebesar Rp3,3 triliun dengan sasaran sebanyak 2,62 juta KPM di seluruh desa. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk penyaluran Dana Desa terdiri atas: (a) penyaluran Dana Desa nonBLT Desa dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40% paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, serta tahap III sebesar 20% paling cepat bulan Juni; dan (b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan secara triwulanan setelah persyaratan penyaluran disampaikan secara lengkap.

Insentif Fiskal pada tahun 2023 terdiri atas Rp4,0 triliun Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Rp4,0 triliun Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Berjalan. Sampai dengan 31 Mei 2023 realisasi penyaluran Insentif Fiskal mencapai Rp1,0 triliun atau 13,1 persen dari pagu, relatif sama dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1,0 triliun (14,3 persen). Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal disebutkan bahwa penggunaan Insentif Fiskal tahun 2023 antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah dan dukungan dunia usaha serta penciptaan lapangan kerja.

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan anggaran tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 terealisasi sebesar Rp118,4 triliun atau 19,8 persen dari pagu alokasi 2023 sebesar Rp598,2 triliun. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp83,6 triliun atau 10,0 persen dari pagu alokasi Perpres 98 tahun 2022. Hal ini terutama diakibatkan oleh kenaikan dalam realisasi pembiayaan utang.

Pembiayaan utang per 31 Mei 2023 secara neto terealisasi sebesar Rp150,4 triliun atau 21,6 persen dari pagu alokasinya sebesar Rp696,3 triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp91,2 triliun atau 9,7 persen dari pagu alokasi Perpres 98 tahun 2022. Kenaikan realisasi pembiayaan utang tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan penerbitan SBN (neto).

Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) neto terdapat realisasi sebesar Rp2,3 triliun yang berasal dari penarikan PDN sebesar Rp3,1 triliun (89,7 persen dari pagunya) dan pembayaran cicilan pokok PDN Rp0,8 triliun (29,7 persen dari pagunya). Sementara pada pinjaman luar negeri neto terdapat realisasi sebesar Rp3,6 triliun yang berasal dari penarikan pinjaman Rp38,2 triliun (61,6 persen dari pagu) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp34,6 triliun (43,6 persen dari pagu). Penarikan pinjaman luar negeri tersebut turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp48,6 triliun, karena Pemerintah tidak lagi melakukan penarikan pinjaman tunai di awal tahun dalam jumlah yang besar seperti halnya yang dilakukan pada awal tahun 2022. Sementara itu, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sedikit lebih tinggi dari Mei tahun sebelumnya yang sebesar Rp34,0 triliun.

Sampai dengan Mei 2023 pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp1,7 triliun atau 32,2 persen dari pagunya. Realisasi tersebut berasal dari realisasi penerusan pinjaman sebesar Rp0,2 triliun (20,2 persen dari pagu) dan realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar Rp1,9 triliun (30,2 persen dari pagu).

Sementara itu, realisasi pembiayaan investasi neto adalah sebesar Rp33,9 triliun, dengan rincian Investasi pada program FLPP sebesar Rp12 triliun, Investasi lembaga LPDP sebesar Rp15 triliun, Investasi kepada lembaga LMAN sebesar Rp10 triliun dan Investasi kepada lembaga LDKPI sebesar Rp2 triliun. Di sisi lain terdapat penerimaan

kembali investasi sebesar Rp5,1 triliun dengan rincian penerimaan kembali investasi dari BPJT sebesar Rp47,0 miliar, penerimaan cicilan pokok investasi sebesar Rp1,0 triliun dan penerimaan IP nonpermanen sebesar Rp4,0 triliun.

Selain itu, alokasi anggaran kewajiban penjaminan sampai dengan 31 Mei 2023 belum direalisasikan (dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah), sama dengan periode yang sama tahun sebelumnya, diantaranya karena mempertimbangkan prioritas realisasi anggaran. Adapun total saldo rekening tersebut sebesar Rp11,9 triliun, yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahun sebelumnya, untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah.

Terkait alokasi pembiayaan lainnya, alokasi penggunaan SAL tahun 2023 sebesar Rp70,0 triliun belum digunakan.

REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN

Gedung Sutikno Slamet Lt. 13 Jl. DR Wahidin No. 1

Jakarta Pusat Telp: (021) 3849315

Email: penyusunan.apbn@gmail.com

Terbatas untuk internal DJA

